

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab I pada penelitian ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian dan kerangka penelitian. Adapun untuk mencapai tujuan dari penelitian ini terdapat 3 sasaran yang harus dipenuhi. Untuk membatasi penelitian ini maka terdapat ruang lingkup berdasarkan wilayah, pembahasan dan substansi. Adapun terdapat beberapa manfaat yang diharapkan sebagai output dari penelitian ini, serta terdapat kerangka penelitian yang menjadi dasar untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan.

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Balikpapan merupakan kota yang berkembang pesat dan menjadi jalur utama masuknya pendatang di Provinsi Kalimantan Timur (Hasmar, 2012). Kota ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (Hasmar, 2012). Hal ini dapat terlihat dari dominasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2017 sebesar 3,78% tertinggi kedua diantara kabupaten/kota yang di Kalimantan Timur (BPS, 2018). Seiring pesatnya perkembangan Kota Balikpapan maka memicu berbagai permasalahan perkotaan baik di sektor ekonomi, sosial maupun lingkungan (DLH Kota Balikpapan, 2015). Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Balikpapan yaitu banjir (DLH Kota Balikpapan, 2015). Banjir merupakan indikasi ketidakseimbangan sistem lingkungan dimana ketidakseimbangan tersebut dipengaruhi oleh aliran debit air yang lebih besar dari daya tampung daerah pengaliran (Siswoko, 2015)

Sejak tahun 2015 banjir menjadi isu prioritas lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dimana pada periode 2009 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan tutupan lahan kawasan hunian di Kota Balikpapan sebesar 13,34%, ditambah hanya 70% kemampuan drainase manampung volume genangan setiap tahunnya (DLH Kota Balikpapan, 2015). Terjadi peningkatan luasan genangan banjir di

Kota Balikpapan, yang dapat dilihat pada tahun 2014 Kota Balikpapan tidak memiliki kawasan terendam namun pada tahun 2016 luasan genangan meningkat hingga 11,34 ha (BPBD Kota Balikpapan, 2016)

Sepanjang tahun 2015 bencana banjir telah melanda Kota Balikpapan sebanyak 88 kejadian dengan 38 titik banjir berada di DAS Ampal (Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2016). Pada tahun 2016, kejadian banjir meningkat menjadi 89 kejadian (Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2017). Dari 89 kejadian tersebut, 9 Kelurahan yang dilewati DAS Ampal tergenang banjir yaitu sebanyak 53 titik banjir (BPBD Kota Balikpapan, 2017). Terdapat 21 Sub DAS dengan luasan dan panjang sungai utama yang berbeda-beda di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal (Yanti, 2019). Sungai utama pada DAS ini memiliki panjang 4900 m mengalir melewati Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Utara, Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan kemudian bermuara di Selat Makassar (Laporan Status Lingkungan Hidup, 2015). Terdapat 8 Sub DAS yang memiliki permasalahan banjir di DAS Ampal yaitu meliputi Sub DAS 2,4,5,7,8,9,13 dan 14 (Yanti, 2019).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2017) diketahui bahwa guna menangani permasalahan banjir di Kota Balikpapan khususnya di DAS Ampal maka diadakan suatu program pengendalian banjir dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Namun menurut Rencana Kerja BAPELITBANG (2018) program pengendalian banjir yang direncanakan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 belum tercapai. Penanganan banjir yang dilakukan pemerintah dari tahun 2014 hingga 2018 hanya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di beberapa lokasi yang berada didalam lingkup DAS Ampal sedangkan program pengendalian banjir belum terlaksana (LPSE, 2019). Terdapat peningkatan upaya penanganan banjir di DAS Ampal yang dilakukan pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2019 yaitu adanya pembangunan drainase utama Sungai Ampal dan pembangunan drainase inlet outlet Bendali Wonorejo, revitalisasi Bendali Wonorejo yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) (LPSE, 2019). Selain itu terdapat pula pelaksanaan program gerakan pemulihan DAS Ampal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LPSE, 2019).

Berbagai upaya penanganan banjir di DAS Ampal telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun 2014 hingga 2019. Namun sepanjang tahun 2019 masih terjadi banjir dengan titik banjir berjumlah 88 titik (BPBD, 2019). Oleh karena itu dilakukan rapat koordinasi oleh BAPELITBANG Kota Balikpapan pada tahun 2019 yang bekerja sama dengan BAPELITBANG Provinsi Kalimantan Timur, untuk membahas strategi apa yang tepat untuk menangani banjir di DAS Ampal (Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendali Banjir dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menjelaskan bahwa

*“Adapun hasil dari rapat koordinasi tersebut yaitu perlu dilakukan normalisasi Sungai Ampal, namun hingga tahun 2020 upaya normalisasi Sungai Ampal ini belum terlaksana dikarenakan masih dalam tahap pembebasan lahan. ...Penanganan banjir di DAS Ampal yang dilakukan saat ini adalah upaya pembersihan baik secara kontraktual maupun swakelola di sepanjang aliran Sungai Ampal” (Rita, 2020)*

Menurut Yanti (2019) Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan program pengendalian banjir berupa pembangunan 3 bangunan pengendali banjir (Bendali) dari total 13 bangunan yang telah direncanakan. Namun pembangunan 3 bendali ini belum dapat mengatasi permasalahan banjir di DAS Ampal (Yanti, 2019). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa

*“Untuk menangani permasalahan banjir yang terjadi di sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya banjir. Hal ini dilakukan agar program atau strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil dan tepat sasaran dalam menangani banjir yang terjadi” (Suryanto, 2020)*

Kewenangan atau kemampuan yang dimiliki Pemerintah untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana banjir cukup besar (Vidia, 2015). Kemampuan tersebut meliputi persiapan perencanaan, tanggap bencana, kebijakan rekonstruksi dan pengentasan permasalahan populasi (Vidia, 2015). Upaya penanganan banjir di wilayah lokal difokuskan kepada pemerintah lokal (kabupaten/kota) sebagai level pertama tahap penanganan bencana banjir, yang didasari oleh beberapa alasan yaitu pemerintah lokal memiliki peran aktif dalam penanganan banjir, pemerintah lokal memiliki wewenang lebih besar serta kebijakan tanggap bencana dibutuhkan di tiap wilayah lokal (Vidia, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa penanganan banjir di

wilayah lokal merupakan tanggung jawab pemerintah lokal (kabupaten/kota) (Vidia, 2015). Dalam kasus penanganan banjir di kawasan DAS, strategi yang dirumuskan harus dilihat dari sudut pandang kawasan DAS, bukan dari tiap daerah administrative (Vidia, 2015). Perlu dilaksanakan koordinasi bersama antar bidang pemerintahan kabupaten/kota dalam satu pandangan untuk menangani banjir di kawasan DAS (Vidia, 2015).

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian yaitu strategi penanganan banjir di kawasan DAS Ampal/Klandasan Besar berdasarkan persepsi Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BAPELITBANG Kota Balikpapan. Dari penelitian ini diharapkan nantinya strategi yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penanganan banjir di DAS Ampal Kota Balikpapan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sepanjang tahun 2015 bencana banjir telah melanda Kota Balikpapan sebanyak 88 kejadian dengan 38 titik banjir berada di DAS Ampal (Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2016). Pada tahun 2016, kejadian banjir meningkat menjadi 89 kejadian (Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2017). Dari 89 kejadian tersebut, 9 Kelurahan yang dilewati DAS Ampal tergenang banjir yaitu sebanyak 53 titik banjir (BPBD Kota Balikpapan, 2017). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menangani banjir di DAS Ampal dari tahun 2014 hingga 2019. Namun sepanjang tahun 2019 masih terjadi banjir dengan titik banjir berjumlah 88 titik (BPBD, 2019). Penanganan banjir di wilayah lokal merupakan tanggung jawab pemerintah lokal (kabupaten/kota) (Vidia, 2015). Dalam kasus penanganan banjir di kawasan DAS, strategi yang dirumuskan harus dilihat dari sudut pandang kawasan DAS, bukan dari tiap daerah administrative (Vidia, 2015). Perlu dilaksanakan koordinasi bersama antar bidang pemerintahan kabupaten/kota dalam satu pandangan untuk menangani banjir di kawasan DAS (Vidia, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pertanyaan penelitian ini yaitu “Bagaimana strategi penanganan

banjir di DAS Ampal/Klandasan Besar berdasarkan pada persepsi Pemerintah Kota Balikpapan?”

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk merumuskan strategi penanganan banjir di kawasan DAS Ampal berdasarkan persepsi Pemerintah Kota Balikpapan.

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

### **1.4 Sasaran**

Adapun sasaran dalam penelitian ini yaitu :

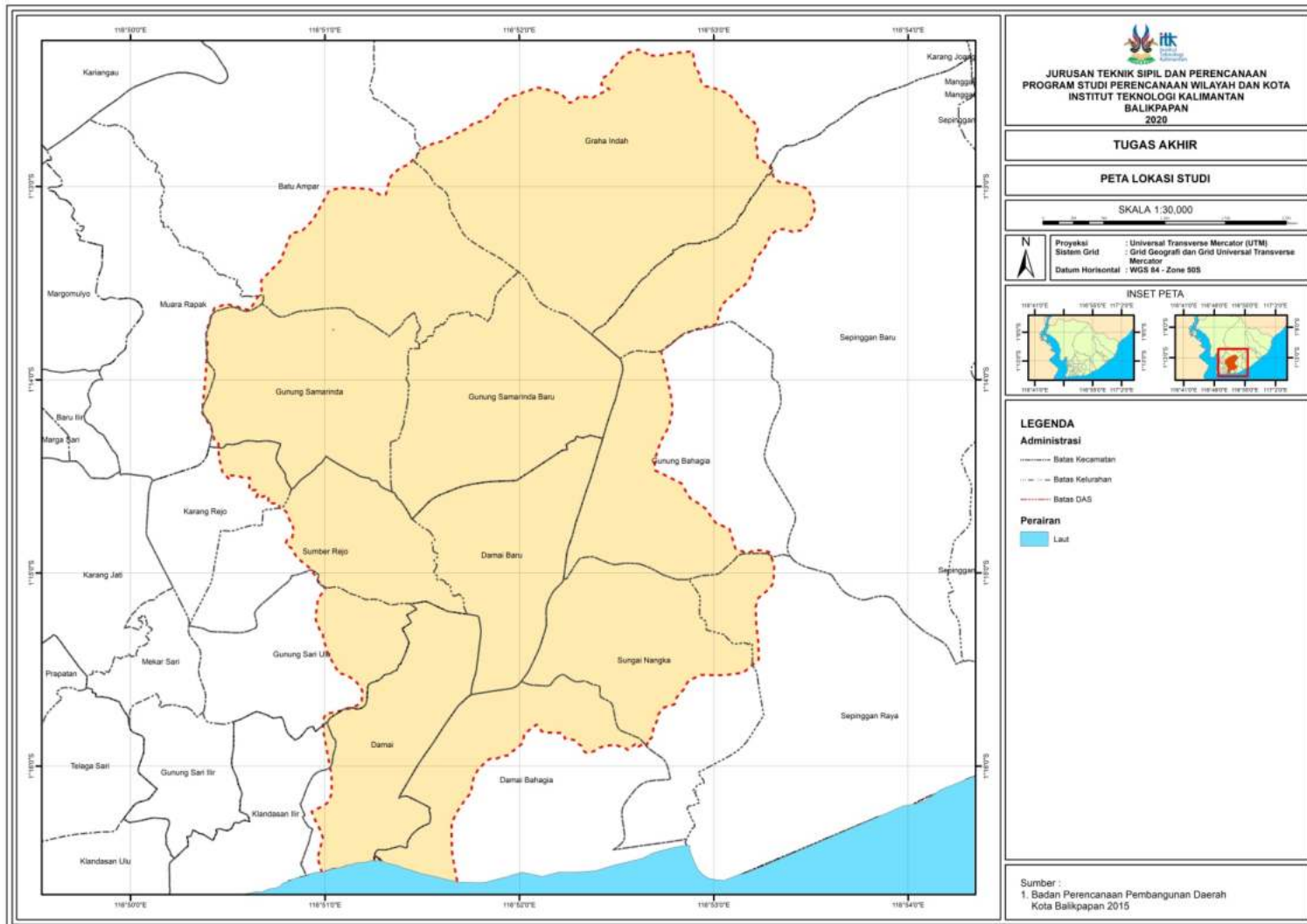
1. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir di Kawasan DAS Ampal/Klandasan Besar berdasarkan persepsi Pemerintah Kota Balikpapan
2. Menganalisis program penanganan banjir yang dilakukan pemerintah berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir di DAS Ampal
3. Merumuskan strategi penanganan banjir di Kawasan DAS Ampal/Klandasan Besar berdasarkan persepsi Pemerintah Kota Balikpapan

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup disusun untuk menentukan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini terbagi menjadi ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup substansi

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu berada di DAS Ampal/Klandasan Besar Kota Balikpapan dengan luas DAS sebesar 2676,9 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Peta Lokasi Studi (BAPELITBANG Kota Balikpapan, 2019)

### **1.5.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir di Kawasan DAS Ampal/Klandasan Besar dan menganalisis kesesuaian program penanganan banjir yang dilakukan pemerintah berdasarkan faktor tersebut sehingga dapat dirumuskan strategi penanganan banjir di DAS Ampal/Klandasan Besar berdasarkan persepsi pemerintah.

www.itk.ac.id

### **1.5.3 Ruang Lingkup Substansi**

Adapun ruang lingkup substansi pada penelitian ini DAS Ampal/Klandasan Besar dengan luas DAS sebesar 2676,9 ha. Selain itu batasan bahasan pada penelitian ini yaitu semua analisis dilakukan berdasarkan persepsi pemerintah. Batasan penelitian ini hanya ingin mengetahui faktor apa yang berpengaruh terhadap banjir di DAS Ampal kemudian dari faktor tersebut disesuaikan dengan program penanganan banjir yang telah dilakukan pemerintah setelah itu dirumuskan strategi penanganan banjir.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

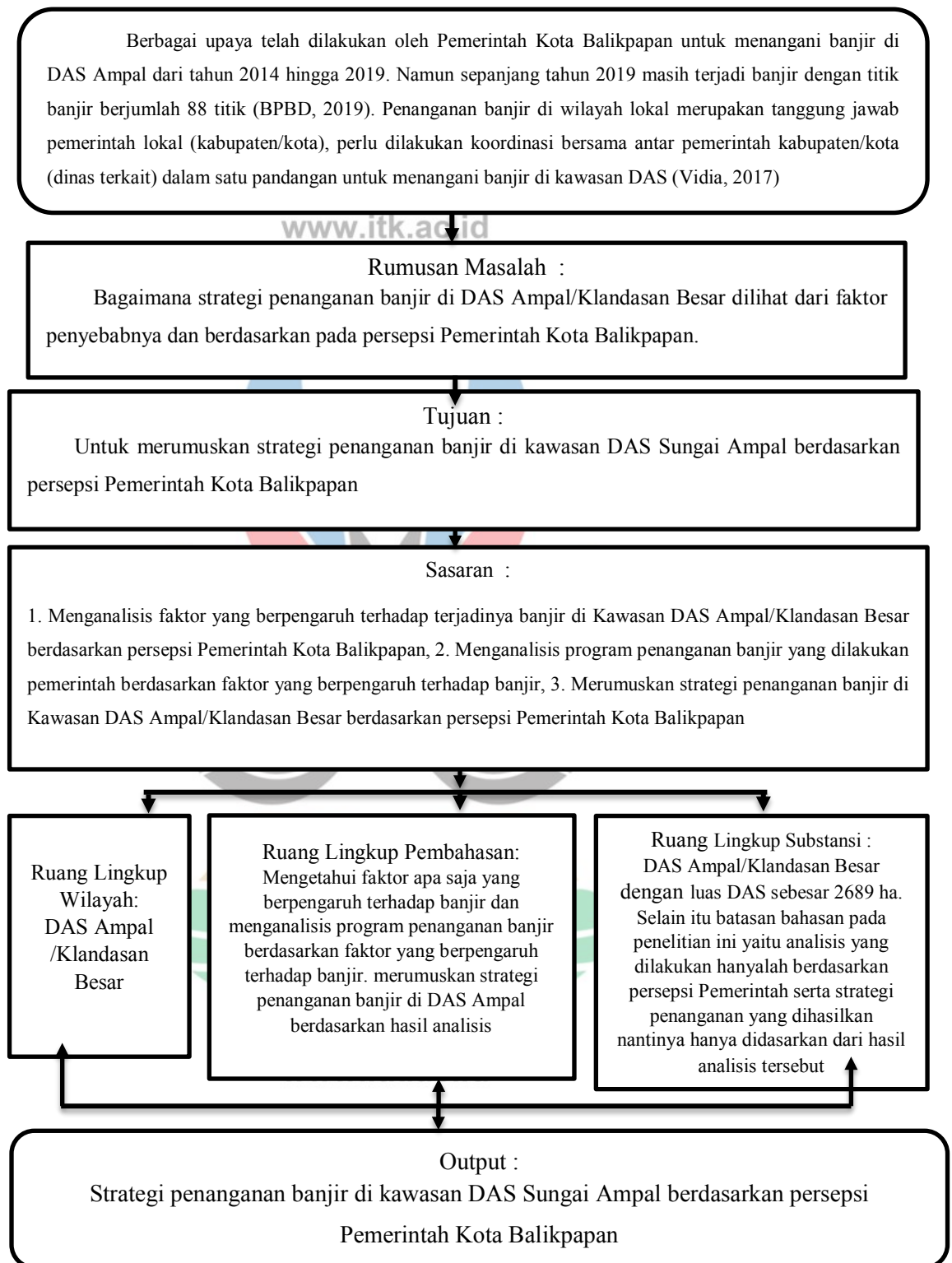
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dari segi akademik dan praktis yaitu :

- a. Segi akademik, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya studi tentang permasalahan banjir di Kota Balikpapan.
- b. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Balikpapan. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan riset selanjutnya baik oleh swasta, pemerintah maupun masyarakat.

www.itk.ac.id

## 1.7 Kerangka Penelitian

Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.



Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian (Penulis, 2019)